



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGOES GANESHA RAHYUDA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 674125

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **3.723.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA FJ40 HARDTOP Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XMAX BPV A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N46LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
4. MOBIL, HONDA HR-V 1.5T RS CVT Tahun 2024, HADIAH Rp. 400.000.000
5. MOBIL, MERCEDES-BENZ E 300 (W214) AT SEDAN Tahun 2024, HADIAH Rp. 1.350.000.000
6. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER 200 VX-R Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **117.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **131.318.374**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.371.818.374

III. HUTANG

Rp. 1.317.466.654

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.054.351.720

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.